



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara

Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 14 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 98

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA
SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) Bupati menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan Pasal 97 ayat (3) Bupati menetapkan pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan /

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SEKABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional ... /

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah yang bersumber dari APBD dan/atau APBDes serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024

sebagaimana... /

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, Tambahan penghasilan sekretaris desa yang PNS, Tunjangan jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Tambahan penghasilan sekretaris Desa yang PNS;
 - c. Tunjangan jabatan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa
 - e. Iuran Jaminan Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - f. Biaya operasional dan /atau pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.
- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 40% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 15% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Sumber data dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
 - b. data jumlah penduduk miskin menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
yang bersumber dari Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional;

- c. data luas wilayah desa menggunakan data Badan Pusat Statistik;
 - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Dalam hal perhitungan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terdapat sisa atau kurang dari hasil perhitungan akibat pembulatan, sisa lebih perhitungan diberikan kepada Desa yang mendapat alokasi terkecil dan sebaliknya kekurangan diambil dari desa dengan alokasi yang paling besar.
- (6) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Desa sampai dengan bulan Nopember tahun 2023.
- (2) Sumber data dalam penghitungan pengalokasian Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah setiap Desa paling cepat bulan Juli.
- (3) Besaran penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b setelah dikurangi besaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tambahan penghasilan sekretaris desa yang PNS, tunjangan jabatan kepala desa, tunjangan Badan Perusyawaratan Desa, Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima peraturan Desa mengenai APBDDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi tahap I tahun berjalan dari kepala Desa.
- (6) Penyaluran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tambahan penghasilan sekretaris desa yang PNS, tunjangan jabatan kepala desa, tunjangan Badan Perusyawaratan Desa, Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan setiap bulan.
- (7) Penyaluran penghasilan tetap, tunjangan dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa.

- (8) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Aparat Pemerintahan Desa dilakukan melalui mekanisme pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing desa oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Samosir berdasarkan tagihan dari masing-masing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD yang ditujukan kepada Bupati Samosir c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 dan /atau Peraturan Kepala Desa tentang Pembayaran Belanja Operasional Pemerintahan Desa Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. Kuitansi Penyaluran yang dibubuhi materai @10.000;
 - d. Daftar Nominatif Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Desa;
 - f. Potocopi Rekening dan NPWP Pemerintah Desa;
 - g. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD untuk pengajuan bulan pertama termasuk SK perubahannya (jika ada).
- (10) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlebih dahulu diverifikasi oleh Camat dan kemudian direkomendasikan kepada Bupati Samosir c.q Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disalurkan melalui Rekening Kas Desa oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (11) Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dalam APBDes.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

(1) Dalam /

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikelola menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDes ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintahan desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah setiap tahap dari RKUD ke RKD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 14 Tahun 2024

Seri F Nomor 948

Tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir



MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 MARET 2024
TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	012	SIMANINDO						
1	1217012001	TOMOK	359,970,600	17,371,000	377,341,600	89,590,000	33,840,200	500,771,800
2	1217012002	SIHUSAPI	337,554,360	16,992,000	354,546,360	14,447,700	5,457,200	374,451,260
3	1217012003	MADUMA	337,554,360	16,000,000	353,554,360	14,973,900	5,656,000	374,184,260
4	1217012004	DOSROHA	337,554,360	16,094,000	353,648,360	21,316,700	8,051,800	383,016,860
5	1217012005	AMBARITA	337,554,360	10,273,000	347,827,360	24,736,600	9,343,600	381,907,560
6	1217012006	MARTOBA	337,554,360	11,958,000	349,512,360	18,405,900	6,952,300	374,870,560
7	1217012007	GAROGA	337,554,360	15,102,000	352,656,360	26,995,800	10,196,900	389,849,060
8	1217012008	SIMANINDO SANGKAL	303,069,720	12,378,000	315,447,720	17,707,800	6,688,600	339,844,120
9	1217012009	CINTA DAME	359,964,840	18,775,000	378,739,840	49,735,800	18,786,300	447,261,940
10	1217012010	HUTAGINJANG	325,480,200	17,934,000	343,414,200	20,106,300	7,594,600	371,115,100
11	1217012011	PARDOMUAN	337,554,360	9,635,000	347,189,360	14,780,100	5,582,800	367,552,260
12	1217012012	PARMONANGAN	303,069,720	10,511,000	313,580,720	15,312,500	5,783,800	334,677,020
	1217012013	PARBALOHAN	503,069,720	9,374,000	512,443,720	14,604,200	5,516,300	532,564,220
	1217012014	TANJUNGAN	303,069,720	14,159,000	317,228,720	15,110,500	5,707,500	338,046,720
15	1217012015	SIMARMATA	337,554,360	12,658,000	350,212,360	31,245,300	11,802,000	393,259,660
16	1217012017	TOMOK PARSAORAN	325,480,200	15,056,000	340,536,200	61,080,500	23,071,500	424,688,200
17	1217012018	MARLUMBA	303,069,720	11,943,000	315,012,720	42,911,800	16,208,800	374,133,320
18	1217012019	SIMANINDO	303,069,720	11,038,000	314,107,720	27,286,600	10,306,700	351,701,020
19	1217012020	UNJUR	303,069,720	9,739,000	312,808,720	55,625,100	21,010,900	389,444,720
20	1217012021	SIALLAGAN PINDARAYA	303,069,720	9,663,000	312,732,720	35,442,400	13,387,400	361,562,520
	JUMLAH		6,695,888,480	266,653,000	6,962,541,480	611,415,500	230,945,200	7,804,902,180
	022	ONAN RUNGGU						
21	1217022001	PAKPAHAN	337,554,360	11,491,000	349,045,360	16,605,200	6,272,200	371,922,760
22	1217022002	HUTA HOTANG	337,554,360	13,987,000	351,541,360	15,655,500	5,913,400	373,110,260
23	1217022003	SITINJAK	337,554,360	13,440,000	350,994,360	16,554,900	6,253,100	373,802,360
24	1217022004	PARDOMUAN	337,554,360	14,611,000	352,165,360	14,830,500	5,601,800	372,597,660
25	1217022005	TAMBUN SUNGKEAN	337,554,360	11,975,000	349,529,360	13,923,800	5,259,300	368,712,460
26	1217022006	RINA BOLAK	337,554,360	10,842,000	348,396,360	14,686,200	5,547,300	368,629,860
27	1217022007	ONAN RUNGGU	337,554,360	13,135,000	350,689,360	15,300,200	5,779,200	371,768,760
28	1217022008	SITAMIANG	303,069,720	9,062,000	312,131,720	14,401,000	5,439,600	331,972,320
29	1217022009	JANJI MATOGU	487,554,360	10,144,000	497,698,360	14,125,400	5,335,500	517,159,260
30	1217022010	SILIMA LOMBU	310,711,920	9,112,000	319,823,920	15,115,500	5,709,400	340,648,820
	1217022011	SIPIRA	359,964,840	23,046,000	383,010,840	14,653,300	5,534,900	403,199,040
	1217022012	HARIAN	337,554,360	14,325,000	351,879,360	14,278,100	5,393,100	371,550,560
	JUMLAH		4,161,735,720	155,170,000	4,316,905,720	180,129,600	68,038,800	4,565,074,120
	032	NAINGGOLAN						
33	1217032001	PANGALOAN	337,554,360	10,717,000	348,271,360	14,589,600	5,510,800	368,371,760
34	1217032002	HUTARIHIT	437,554,360	15,522,000	453,076,360	13,897,500	5,249,400	472,223,260
35	1217032003	SINAGA URUK PANDIANGAN	337,554,360	15,122,000	352,676,360	14,673,400	5,542,500	372,892,260
36	1217032004	TOGUAN GALUNG	337,554,360	17,428,000	354,982,360	14,504,000	5,478,500	374,964,860
37	1217032005	PANANGGANGAN	303,069,720	16,898,000	319,967,720	14,218,400	5,370,600	339,556,720
38	1217032006	PASARAN PARSAORAN	413,311,920	11,598,000	424,909,920	13,897,500	5,249,400	444,056,820
39	1217032007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	437,554,360	12,664,000	450,218,360	13,604,600	5,138,700	468,961,660
40	1217032008	SIBONOR OMPU RATUS	337,554,360	10,308,000	347,862,360	14,328,100	5,412,000	367,602,460
41	1217032009	NAINGGOLAN	437,554,360	9,293,000	446,847,360	31,180,700	11,777,600	489,805,660
42	1217032010	PASARAN I	337,554,360	9,160,000	346,714,360	13,807,400	5,215,400	365,737,160
43	1217032013	PANANGGANGAN II	303,069,720	16,824,000	319,893,720	13,841,300	5,228,200	338,963,220
44	1217032014	SIPINGGAN	303,069,720	10,434,000	313,503,720	15,737,600	5,944,400	335,185,720
45	1217032015	JANJI MARAPOT	303,069,720	13,946,000	317,015,720	13,835,900	5,226,100	336,077,720
	JUMLAH		4,626,025,680	169,914,000	4,795,939,680	202,116,000	76,343,600	5,074,399,280

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	042	PALUPI						
46	1217042001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	310,711,920	10,520,000	321,231,920	14,100,900	5,326,200	340,659,020
47	1217042002	GORAT PALLOMBUAN	337,554,360	11,869,000	349,423,360	14,225,600	5,373,300	369,022,260
48	1217042003	URAT II	337,554,360	17,315,000	354,869,360	38,422,900	14,513,200	407,805,460
49	1217042004	PALUPI	391,264,840	14,281,000	405,545,840	15,019,000	5,673,000	426,237,840
50	1217042005	PARDOMUAN NAULI	335,349,120	18,741,000	354,090,120	13,694,500	5,172,700	372,957,320
51	1217042006	HATOGUAN	337,554,360	15,313,000	352,867,360	14,001,300	5,288,600	372,157,260
52	1217042007	SIMBOLON PURBA	357,759,600	25,378,000	383,137,600	16,798,500	6,345,100	406,281,200
53	1217042008	SIGAOL SIMBOLON	337,554,360	13,309,000	350,863,360	14,948,600	5,646,400	371,458,360
54	1217042009	URAT TIMUR	310,711,920	9,479,000	320,190,920	14,219,800	5,371,100	339,781,820
55	1217042010	SAOR NAULI HATOGUAN	359,964,840	20,393,000	380,357,840	14,848,100	5,608,400	400,814,340
56	1217042011	PARSAORAN URAT	337,554,360	9,767,000	347,321,360	14,756,300	5,573,800	367,651,460
57	1217042012	HUTAGINJANG	388,506,680	16,069,000	404,575,680	14,609,700	5,518,400	424,703,780
58	1217042014	SIGAOL MARBUN	559,964,840	21,832,640	581,797,480	15,586,100	5,887,200	603,270,780
59	1217042018	HUTADAME	303,069,720	10,715,000	313,784,720	13,935,400	5,263,700	332,983,820
60	1217042019	PALLOMBUAN	303,069,720	6,537,000	309,606,720	23,043,700	8,704,100	341,354,520
61	1217042020	PAMUTARAN	276,227,280	17,414,000	293,641,280	13,647,700	5,155,000	312,443,980
62	1217042021	SIDEAK	303,069,720	14,020,000	317,089,720	14,381,600	5,432,200	336,903,520
	JUMLAH		5,887,442,000	252,952,640	6,140,394,640	280,239,700	105,852,400	6,526,486,740
	052	HARIAN						
63	1217052001	SOSOR DOLOK	310,711,920	9,148,000	319,859,920	41,974,400	15,854,700	377,689,020
64	1217052002	PARTUNGKONAGINJANG	337,554,360	49,522,000	387,076,360	19,563,900	7,389,700	414,029,960
65	1217052003	HARIARA POHAN	303,069,720	11,027,000	314,096,720	21,311,600	8,049,900	343,458,220
	1217052004	DOLOK RAJA	537,554,360	9,692,000	547,246,360	14,093,700	5,323,500	566,663,560
67	1217052006	SAMPUR TOBA	337,554,360	13,396,000	350,950,360	14,652,500	5,534,500	371,137,360
68	1217052007	SIPARMAHAN	403,069,720	16,099,000	419,168,720	14,538,200	5,491,400	439,198,320
69	1217052008	TURPUK LIMBONG	337,554,360	8,700,000	346,254,360	14,387,900	5,434,600	366,076,860
70	1217052009	TURPUK SAGALA	311,049,120	6,833,000	317,882,120	13,676,300	5,165,800	336,724,220
71	1217052010	TURPUK MALAU	411,049,120	7,998,000	419,047,120	16,851,600	6,365,200	442,263,920
72	1217052011	TURPUK SIHOTANG	311,049,120	7,638,000	318,687,120	14,557,600	5,498,700	338,743,420
73	1217052012	JANJI MARTAHAN	276,564,480	9,231,000	285,795,480	42,890,000	16,200,500	344,885,980
74	1217052014	HUTAGALUNG	303,069,720	40,140,000	343,209,720	15,910,100	6,009,600	365,129,420
75	1217052015	HARIARA PINTU	325,480,200	50,428,000	375,908,200	15,962,500	6,029,400	397,900,100
	JUMLAH		4,505,330,560	239,852,000	4,745,182,560	260,370,300	98,347,500	5,103,900,360
	062	SIANJUR MULA MULA						
76	1217062001	HUTA GINJANG	337,554,360	12,354,000	349,908,360	14,103,600	5,327,200	369,339,160
77	1217062002	SINGKAM	337,554,360	11,577,000	349,131,360	14,245,600	5,380,900	368,757,860
78	1217062003	HASINGGAAN	320,311,920	26,388,000	346,699,920	13,935,800	5,263,900	365,899,620
79	1217062004	AEK SIPITUDAI	337,554,360	11,217,000	348,771,360	18,010,700	6,803,000	373,585,060
80	1217062005	HUTA GURGUR	337,554,360	14,766,000	352,320,360	13,946,900	5,268,000	371,535,260
81	1217062006	SIANJUR MULA MULA	303,069,720	14,301,000	317,370,720	26,959,000	10,183,000	354,512,720
82	1217062007	BOHO	367,554,360	14,381,000	381,935,360	14,276,300	5,392,400	401,604,060
83	1217062008	SIBORO	337,554,360	13,543,000	351,097,360	14,330,000	5,412,700	370,840,060
	1217062009	SARIMARRIHIT	337,554,360	13,916,000	351,470,360	14,092,100	5,322,900	370,885,360
	1217062010	GINOLAT	320,311,920	11,365,000	331,676,920	17,595,100	6,646,000	355,918,020
86	1217062011	BONAN DOLOK	337,554,360	14,211,000	351,765,360	14,171,000	5,352,700	371,289,060
87	1217062012	HABEAHAN NABURAHAN	303,069,720	10,694,000	313,763,720	14,190,800	5,360,200	333,314,720
	JUMLAH		3,977,198,160	168,713,000	4,145,911,160	189,856,900	71,712,900	4,407,480,960
	072	RONGGUR NIHUTA						
88	1217072001	SALAON TOBA	337,554,360	12,488,000	350,042,360	16,051,000	6,062,800	372,156,160
89	1217072002	LINTONG NIHUTA	359,964,840	19,259,000	379,223,840	14,456,100	5,460,400	399,140,340
90	1217072003	SALAON TONGA TONGA	337,554,360	12,941,000	350,495,360	14,878,800	5,620,100	370,994,260
91	1217072004	SALAON DOLOK	368,854,360	22,314,000	391,168,360	14,581,000	5,507,600	411,256,960
92	1217072005	RONGGUR NIHUTA	359,964,840	26,169,000	386,133,840	15,360,100	5,801,800	407,295,740
93	1217072006	SABUNGAN NIHUTA	337,554,360	15,761,000	353,315,360	14,445,400	5,456,300	373,217,060
94	1217072007	PARADUAN	537,554,360	19,611,000	557,165,360	14,204,400	5,365,300	576,735,060
95	1217072008	SIJAMBUR	321,069,720	21,379,000	342,448,720	14,915,700	5,634,000	362,998,420
	JUMLAH		2,960,071,200	149,922,000	3,109,993,200	118,892,500	44,908,300	3,273,794,000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	082	PANGURURAN						
96	1217082001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	310,711,920	14,170,000	324,881,920	14,994,900	5,663,900	345,540,720
97	1217082002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	359,964,840	16,902,000	376,866,840	18,834,400	7,114,200	402,815,440
98	1217082003	PARBABA DOLOK	387,554,360	17,255,000	404,809,360	23,044,200	8,704,300	436,557,860
99	1217082004	HUTA TINGGI	337,554,360	13,194,000	350,748,360	20,157,500	7,613,900	378,519,760
100	1217082005	PARHORASAN	337,554,360	17,502,000	355,056,360	14,064,800	5,312,600	374,433,760
101	1217082006	PARDOMUAN NAULI	310,711,920	11,981,000	322,692,920	14,672,200	5,542,000	342,907,120
102	1217082007	PARSAORAN I	337,554,360	11,180,000	348,734,360	20,704,000	7,820,300	377,258,660
103	1217082008	RIANIATE	359,964,840	25,131,000	385,095,840	15,427,400	5,827,300	406,350,540
104	1217082009	HUTA BOLON	310,711,920	7,208,000	317,919,920	40,721,200	15,381,300	374,022,420
105	1217082010	PANAMPANGAN	310,711,920	9,764,000	320,475,920	17,502,800	6,611,200	344,589,920
106	1217082011	PARDUGUL	310,711,920	8,994,000	319,705,920	16,724,700	6,317,300	342,747,920
107	1217082012	HUTA NAMORA	359,964,840	21,801,000	381,765,840	31,095,000	11,745,300	424,606,140
108	1217082013	PARLONDUT	310,711,920	9,909,000	320,620,920	15,975,000	6,034,100	342,630,020
109	1217082014	TANJUNG BUNGA	359,964,840	16,103,000	376,067,840	15,673,700	5,920,300	397,661,840
110	1217082015	PARMONANGAN	337,554,360	13,770,000	351,324,360	14,713,200	5,557,500	371,595,060
111	1217082016	SAIT NIHUTA	310,711,920	9,064,000	319,775,920	14,689,500	5,548,500	340,013,920
112	1217082017	SITUNGKIR	360,711,920	6,459,000	367,170,920	17,995,800	6,797,400	391,964,120
113	1217082018	SIANTING-ANTING	310,711,920	10,057,000	320,768,920	23,896,400	9,026,200	353,691,520
114	1217082019	SIALANGUAN	376,227,280	6,354,000	382,581,280	17,760,500	6,708,500	407,050,280
115	1217082020	LUMBAN PINGGOL	310,711,920	9,874,000	320,585,920	14,579,800	5,507,100	340,672,820
116	1217082021	PARDOMUAN I	382,375,320	30,761,000	413,136,320	152,413,700	57,570,200	623,120,220
117	1217082022	SITOLU HUTA	310,711,920	9,383,000	320,094,920	17,764,600	6,710,100	344,569,620
	1217082023	SINABULAN	310,711,920	8,408,000	319,119,920	14,995,500	5,664,100	339,779,520
119	1217082024	AEK NAULI	310,711,920	11,072,000	321,783,920	15,512,600	5,859,500	343,156,020
120	1217082025	SIOPAT SOSOR	303,069,720	8,574,000	311,643,720	305,780,900	115,500,600	732,925,220
JUMLAH			8,328,558,440	324,870,000	8,653,428,440	889,694,300	336,057,700	9,879,180,440
	092	SITIOTIO						
121	1217092001	HOLBUNG	537,554,360	19,247,000	556,801,360	14,143,700	5,342,400	576,287,460
122	1217092002	JANJI RAJA	320,311,920	20,535,000	340,846,920	13,428,800	5,084,400	359,360,120
123	1217092003	SABULAN	337,554,360	19,921,000	357,475,360	14,206,500	5,366,100	377,047,960
124	1217092004	BUNTU MAULI	337,554,360	15,111,000	352,665,360	13,893,200	5,247,700	371,806,260
125	1217092005	TAMBA DOLOK	303,069,720	17,257,000	320,326,720	15,641,600	5,908,200	341,876,520
126	1217092006	CINTA MAJU	337,554,360	12,948,000	350,502,360	14,672,900	5,542,300	370,717,560
127	1217092007	PARSAORAN	303,069,720	15,957,000	319,026,720	15,082,200	5,696,900	339,805,820
128	1217092008	JANJIMARIA	303,069,720	15,913,000	318,982,720	13,936,000	5,263,900	338,182,620
JUMLAH			2,779,738,520	136,889,000	2,916,627,520	115,004,900	43,451,900	3,075,084,320
TOTAL			43,921,988,760	1,864,935,640	45,786,924,400	2,847,719,700	1,075,658,300	49,710,302,400

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 14 Tahun 2024
Seri F Nomor 948
Tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA SKINJAK